

RENJA PERUBAHAN

Tahun 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

KAB. GORONTALO UTARA



Alamat : Jln. Kusnodanupoyo Blok Plan No.03 Molvingkapoto Kwandang Kode Pos 96252

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2025, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat 2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program Kabupaten 3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan ke-I.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu selama 2 (dua) triwulan yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi Masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program–program prioritas.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE-I

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan ke-I dan Capaian Renstra OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE-I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan ke-I dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 sampai dengan Triwulan ke-I juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 sampai dengan Triwulan ke-I meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan, Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan, dan Hasil Rencana Program dan Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke-I sebagai entry point dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
GORONTALO UTARA

- Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara
- Visi : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Unggul, Nyaman dan Handal untuk Kabupaten Gorontalo Utara yang Sejahtera
- Misi :
 1. Meningkatkan kualitas pembangunan jalan / jembatan kabupaten Gorontalo Utara
 2. Melaksanakan pengelolaan sistem jaringan irigasi serta Mengoptimalkan pengelolaan sungai dan pantai
 3. Mewujudkan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan merata
 4. Mewujudkan tata bangunan yang terintegrasi serta penataan lingkungan yang indah dan bersih
 5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum
- Tujuan :
 1. Terbangunnya infrastruktur jalan kabupaten dengan struktur yang baik dan umur pakai panjang
 2. Terbangunnya infrastuktur irigasi, sungai, pantai
 3. Terbangunnya sistem jaringan instalasi air bersih serta sarana dan prasarana sanitasi
 4. Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
 5. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan akuntabel

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	$\frac{\text{Luasan Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW}}{\text{Luasan RTRW Kabupaten}} \times 100 \%$	BIDANG PENATAAN RUANG
Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Penyediaan Infrastruktur yang dilaksanakan	Rata – rata capaian dari indikator : 1. Persentase Luasan Irigasi yang baik 2. Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik 3. Persentase Rumah Tangga yang terpenuhi air bersih 4. Persentase Rumah Tangga yang bersanitasi	BIDANG BINA MARGA, BIDANG SDA, BIDANG CIPTA KARYA
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perhitungan survey berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik	SEKRETARIAT

Capaian Program Kegiatan Peningkatan Jalan Selang Tahun 2022 s./d. 2025

No	Tahun Anggaran	Panjang Jalan yang dikerjakan	Jumlah Ruas Yang Dikerjakan
1	2022	21,38 km	23 Ruas
2	2023	23,25 km	12 Ruas
3	2024	9,96 km	5 Ruas
4	2025	1,8 km	4 Ruas

Program kegiatan peningkatan jalan selang Tahun 2022 s./d. 2025 bersumber dari APBD dan Dana DAK/DAU dan pada Tahun 2022 panjang jalan yang dikerjakan 21,38 km dengan jumlah ruas yang dikerjakan 23 ruas. Pada Tahun 2023 panjang jalan yang dikerjakan 23,25 km dengan jumlah ruas yang dikerjakan 12 ruas. Pada Tahun 2024 panjang jalan yang dikerjakan 9,96 km dengan jumlah ruas yang dikerjakan 5 ruas. Pada Tahun 2025 panjang jalan yang dikerjakan 1,8 km dengan jumlah ruas yang dikerjakan 4 ruas.

Capaian Program Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Selang Tahun 2022 s/d 2025

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Total luasan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kab. Gorontalo Utara seluas 5.567 ha, dengan jumlah 36 daerah irigasi. Dari total tersebut luasan yang fungsional 2.715 ha. Layanan yang dilaksanakan pada tahun 2024 menghasilkan capaian dengan luas irigasi kewenangan kab/kota yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, di operasi dan dipelihara yaitu sebanyak 245, 34 ha.

Capaian Program Kegiatan Pengembangan Kinerja Air Minum

Selang Tahun 2022 s/d 2025

Rumah berakses air bersih atau rumah berakses air minum layak dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Untuk mendukung hal tersebut Dinas PUPR dari tahun 2022 sampai dengan 2025 telah melaksanakan kegiatan yang bersumber baik itu dana DAK maupun DAU

No	Tahun Anggaran	Jumlah RT yang terlayani
1	2022	100 RT
2	2023	37 RT
3	2024	25 RT
4	2025	 RT

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penurunan jumlah sambungan rumah yang dikarenakan pemerintah daerah masih mengembangkan jaringan perpipaan guna menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

Capaian Program Kegiatan Pengembangan Kinerja Air Limbah

Selang Tahun 2022 s/d 2025

Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Program Kegiatan Pengembangan Kinerja Air Limbah dengan jumlah rumah tangga yang terlayani 362 RT. Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Program Kegiatan Pengembangan Kinerja Air Limbah dengan jumlah rumah tangga yang terlayani 25 RT. Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Program Kegiatan Pengembangan Kinerja Air Limbah dengan jumlah rumah tangga yang terlayani 25 RT.

**Capaian Program Kegiatan Pengembangan Air Limbah
Selang Tahun 2022 s/d 2025**

No	Tahun Anggaran	Jumlah RT yang terlayani
1	2022	362 RT
2	2023	25 RT
3	2024	25 RT
4	2025	 RT

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penurunan jumlah sambungan rumah yang dikarenakan kondisi fiskal pemerintah daerah terbatas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara untuk Periode Triwulan ke-II dan ke-IV dan mempunyai fungsi:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bagian Sekretariat, Bagian Penataan Ruang, Bagian Bina Marga, Bagian SDA dan Bagian Cipta Karya), karena memuat seluruh kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022-2025 dalam rencana Program kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bagian dan bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bagian dan bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.2 Program dan Kegiatan

a. **Tugas OPD** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi bidang pekerjaan umum, dengan **Fungsi OPD yakni** Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan pelayanan umum, Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugas.

b. **Tujuan OPD** Melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan mendukung program pemerintah di bidang ke PU-an, adapun proses penyelenggaraan, pembangunan diatas bertujuan untuk Mewujudkan program kerja ke PU-an pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya, dan Bidang Penataan Ruang yaitu ;

- ✚ Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang matang;

- ✚ Mewujudkan sarana pengairan dan irigasi yang baik ;

- ✚ Mewujudkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap ;

- ✚ Mewujudkan bangunan yang teratur, layak huni dan layak pakai ;

c. **Sasaran OPD**

Sasaran yang diharapkan akan tercapai yaitu “Terselenggaranya Kegiatan ke PU-an dengan Baik dan Bermanfaat” Kegiatan ke PU-an dapat terselenggara dengan baik jika kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan dapat dirasakan oleh masyarakat, jika salah satu item tersebut timpang maka sasaran akan sulit tercapai.

d. **Pembangunan Infrastruktur**

➤ **Jalan dan Jembatan**

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana, Kebijakan,dan Strategi Pengembangan

- Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan

➤ **Sungai**

Pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah; Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan harus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Sungai/Pantai yang belum tertangani.

➤ **Irigasi**

Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi; Rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; Peningkatan fungsi jaringan irigasi dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, sedangkan untuk rehabilitasi diutamakan pada wilayah andalan penghasil padi; Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan; Pengawasan dan penanganan berkelanjutan serta pembangunan daerah irigasi yang belum tertangani dengan baik.

Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan : - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
WS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pembangunan Tanggul Sungai

Kegiatan : - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

➤ **Air Bersih**

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menyebabkan banjir dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau, pencemaran limbah industri dan rumah tangga pada badan air yang dapat menurunkan kualitas air adalah penyebab utama kerusakan infrastruktur Air Bersih. Di sisi lain keterbatasan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur air bersih adalah salah satu tantangan pembangunan infrastruktur air bersih.

Pencegahan kebocoran air bersih / minum; Peningkatan pengelolaan pelayanan air bersih / minum yang dilakukan oleh BLU SPAM; Peningkatan instalasi air bersih untuk masyarakat yang sulit terjangkau air terutama di wilayah pegunungan; Peningkatan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana air bersih/ minum yang lancar;

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan : - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

➤ **Sanitasi**

Belum meratanya sarana dan prasarana Sanitasi sehingga perlu adanya Pembangunan MCK secara merata di 11 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

➤ **Infrastruktur penunjang Pemerintahan**

Infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup memadai, hal ini dibuktikan dengan dibangunnya Kompleks Blok Plan Perkantoran akan tetapi masih adanya beberapa OPD yang belum memiliki gedung permanen. Serta masih adanya Kantor Camat berserta Gedung Penunjang yang masih perlu dilakukan rehabilitasi.

Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan : - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota

e. Program dan Kegiatan

Untuk menjalankan program-program diatas perlu ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tanggal 18

Oktober 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tanggal 05 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Kegiatan : - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Fasilitas Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : - Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan : - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,

Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pembangunan Tanggul Sungai

Kegiatan : - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota

Sub Kegiatan : - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

5. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan : - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota

6. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana, Kebijakan,dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Pembangunan Jalan
- pelebaran Jalan Menuju Standar
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan

7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU 2025 (RANCANGAN AWAL)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GORONTALO UTARA

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				67,700,000,000				71,125,000,000
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-				-
	1.03.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				-				-
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln				37 Org/Bln	
	1.03.01.2.05.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				-				-
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Org				37 Org	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Org				7 Org	
	1.03.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-				-
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan				5 laporan	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan				5 laporan	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				1 Unit	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit				0 Unit	
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit				1 unit	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Paket				1 unit	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Paket				1 Paket	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket				1 Paket	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				15,000,000,000				8,000,000,000
	1.03.02.2.01	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				5,000,000,000				3,000,000,000
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1 Km	1,000,000,000			1 Km	500,000,000
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,5 Km	500,000,000			0,5 Km	500,000,000
	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan		Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	500,000,000			1 Bendungan	300,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				1 Unit	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit				0 Unit	
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit				1 unit	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Paket				1 unit	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Paket				1 Paket	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket				1 Paket	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				15,000,000,000				8,000,000,000
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,000,000,000				3,000,000,000
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1 Km	1,000,000,000			1 Km	500,000,000
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,5 Km	500,000,000			0,5 Km	500,000,000
	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan		Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	500,000,000			1 Bendungan	300,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan		Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	500,000,000			1 Bendungan	300,000,000
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,5 Km	1,000,000,000			0,5 Km	500,000,000
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,5 Km	500,000,000			0,5 Km	300,000,000
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dok	500,000,000			1 Dok	200,000,000
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,5 Km	500,000,000			0,5 Km	400,000,000
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000,000				5,000,000,000
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 Km	3,000,000,000			1 Km	1,000,000,000
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 Km	3,000,000,000			1 Km	1,000,000,000
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 Km	3,500,000,000			1 Km	2,500,000,000
	1.03.02.2.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	5 Dok	500,000,000			5 Dok	500,000,000
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				12,500,000,000				6,000,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota				12,500,000,000				6,000,000,000
	1.03.03.2.01.0004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	12,000,000,000			10 Liter/Detik	5,500,000,000
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	100 SR	500,000,000			100 SR	500,000,000
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,000,000,000				3,000,000,000
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5,000,000,000				3,000,000,000
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	0,2 M³/hari	2,750,000,000			0,2 M³/hari	1,500,000,000
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	20 M³/hari	1,000,000,000			20 M³/hari	500,000,000
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 RT	500,000,000			175 RT	500,000,000
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	750,000,000			1 Unit	500,000,000
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								5,000,000,000
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000,000

					Rencana Tahun 2024 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	------------------------------

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Sistem Drainase lingkungan yang dioptimalisasi	200 Meter				200 Meter	500,000,000
	1.03.06.2.01.0022	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	10 Paket				10 Paket	1,000,000,000
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	10 Paket				10 Paket	1,000,000,000
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah sistem drianase Perkotaan yang direhabilitasi	10 Paket				10 Paket	500,000,000
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Paket				10 Paket	1,000,000,000
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	200 Meter				200 Meter	1,000,000,000
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				35,000,000,000				45,000,000,000
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota				35,000,000,000				45,000,000,000
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5 Dok	500,000,000			5 Dok	500,000,000
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	1 km	3,000,000,000			1 km	5,000,000,000
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang direkonstruksi	5 km	22,500,000,000			5 km	27,500,000,000
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan berkala jalan		Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	1 km	3,500,000,000			1 km	4,000,000,000
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	1 Unit	500,000,000			1 Unit	1,500,000,000
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	1 Unit	1,500,000,000			1 Unit	2,000,000,000
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan		Jumlah jembatan yang dibangun	1 Unit	1,500,000,000			1 Unit	1,500,000,000
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan berkala jembatan		Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1,000,000,000			1 Unit	1,000,000,000
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan		Panjang jalan/ jembatan yang disurvei kondisinya	521,12 Km	500,000,000			521,12 Km	500,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang dipelihara Secara Rutin	1 km	500,000,000			1 Unit	1,500,000,000
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				150,000,000				4,000,000,000
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				150,000,000				4,000,000,000
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	100,000,000			2 Dok	2,700,000,000
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20 Dok	50,000,000			20 Dok	800,000,000
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dok				1 Dok	500,000,000
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				50,000,000				125,000,000
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota				50,000,000				125,000,000

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dok	-			1 Dok	25,000,000
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	15 Dok	25,000,000			15 Dok	25,000,000
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dok				1 Dok	25,000,000
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Perda RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dok	25,000,000			1 Dok	50,000,000
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-				-
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dok				1 Dok	
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dok				1 Dok	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dok				1 Dok	
	1.03.12.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dok				1 Dok	
	1.03.12.1.03.0002	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dok				1 Dok	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab./ Kota				-				-
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus				1 Kasus	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dok				0 Dok	
	1.03.12.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0 Dok				0 Dok	
	1.03.12.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	0 Dok				0 Dok	

USULAN PAGU RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor rekening					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Induk	Penambahan	Pengurangan	Anggaran Akhir
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.330.841.360	-	71.890.605.915,00	10.440.235.445
					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	82.330.841.360	-	71.890.605.915,00	10.440.235.445
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.984.786.860,00	-	82.097.415,00	2.902.689.445,00
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.911.026.860,00	-	115.097.415,00	2.795.929.445,00
1	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.911.026.860,00	-	115.097.415,00	2.795.929.445,00
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	7.000.000,00	-	32.000.000,00
1	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	7.000.000,00	-	32.000.000,00
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.000.000,00	26.000.000,00	-	65.000.000,00
1	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	26.000.000,00	-	65.000.000,00
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.760.000,00	-	-	9.760.000,00

1	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.760.000,00	-	-	9.760.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.774.063.000,00	-	5.774.063.000,00	-
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.774.063.000,00	-	5.774.063.000,00	-
1	03	02	2,02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.774.063.000,00	-	5.774.063.000,00	-
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	20.960.000,00	-	12.000.000,00	8.960.000,00
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.960.000,00	-	12.000.000,00	8.960.000,00
1	03	05	2,01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	20.960.000,00	-	12.000.000,00	8.960.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.407.800.000,00	-	6.162.907.000,00	3.244.893.000,00
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.407.800.000,00	-	6.162.907.000,00	3.244.893.000,00
1	03	08	2,01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	1.482.000.000,00	-	1.088.837.000,00	393.163.000,00

					Kabupaten/Kota				
1	03	08	2,01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.432.800.000,00	-	4.754.800.000,00	2.678.000.000,00
1	03	08	2,01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	493.000.000,00	-	319.270.000,00	173.730.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	64.143.231.500,00	-	59.859.538.500,00	4.283.693.000,00
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	64.143.231.500,00	-	59.859.538.500,00	4.283.693.000,00
1	03	10	2,01	0033	Rekonstruksi Jalan	63.550.511.500,00	-	59.466.818.500,00	4.083.693.000,00
1	03	10	2,01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	592.720.000,00	-	392.720.000,00	200.000.000,00
JUMLAH						82.330.841.360			10.440.235.445

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara, Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksana program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan

pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan berikutnya.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dikarenakan terjadi beberapa pergeseran anggaran atau perubahan anggaran, hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan atau paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena persoalan teknis dilapangan mengacu pada kewenangan kabupaten serta adanya penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai berdasarkan kebutuhan pada program kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan untuk pergeseran pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan terjadi pada kegiatan irigasi, drainase, sunga/pantai, dan jalan. Untuk memenuhi terwujudnya administrasi yang baik maka hal ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian nomenklatur pada program, kegiatan dan sub kegiatan dan dilakukan pula penyesuaian nomenklatur sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilapangan, tentunya sesuai ketentuan yang ada perlu diadakan penyesuaian.

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara dan Kepala OPD mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Provinsi Gorontalo.

Kwandang, Desember 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



HARIS Z. LATIF, ST. MT.
NIP : 19691210 199203 1 006